

**“Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Pada Kewenangan Pejabat
Publik Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC Tahun 2003 Sebagai
Upaya Revolusi Hukum di Indonesia”**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Sendiartono Yugo Raharjo

NIM : 21710285

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

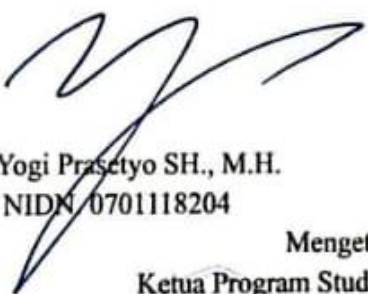
Judul : Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Pada Kewenangan
Pejabat Publik Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC
2003 Sebagai Upaya Revolusi Hukum di Indonesia
Nama : Sendiartono Yugo Raharjo
NIM : 21710285
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyusun
skripsi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Ponorogo, 26 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

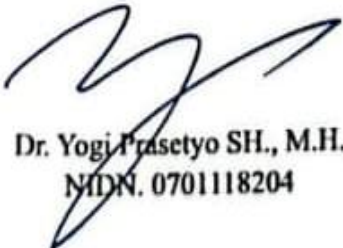

Dr. Yogi Prasetyo SH., M.H.
NIDN. 0701118204


Dr. Ucuk Agiyanto S.H., M.Hum.
NIDN. 0701017001

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum




Alfalachu Indiantoro S.H., M.H.
NIDN. 0721046004
Dosen Penguji


Dr. Yogi Prasetyo SH., M.H.
NIDN. 0701118204


Dr. Ucuk Agiyanto S.H., M.Hum.
NIDN. 0701017001

ABSTRAK

Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) adalah sebuah mekanisme perampasan aset yang memungkinkan perampasan dilakukan secara cepat dan efisien tanpa perlu menunggu adanya hasil putusan hakim dalam proses persidangan terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan perampasan aset tanpa pemidanaan. oleh karena sering kali para pejabat publik menyalahgunakan wewenang atau kebijakan nya, sehingga terlalu banyak pejabat yang terseret baik tindak pidana korupsi, pencucian uang, penggelapan dan juga penadahan membuat para akedemisi dan para penegak hukum mengambil sikap untuk segera memberlakukan mekanisme NCBAF ini di indonesia. penelitian ini bertujuan menjadi pedoman dasar supaya mekanisme NCBAF terjadi di indonesia untuk mewujudkan revolusi hukum demi rakyat, bangsa dan negara. adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam menjawab mengenai segala tantangan yang akan dihadapi. hasil yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dari NCBAF menghasilkan perampasan aset yang efisien, cepat dan sesuai dengan Undang Undang 1945 mengenai hak hak warga negara yang menegaskan bahwa keinginan rakyat indonesia dalam hal dana dari sita aset akan disalurkan demi menghidupi serta mencukupi kebutuhan kebutuhan daripada rakyat atas kekurangan fasilitas negara selama ini. peraturan perundangan undangan yang saat ini diberlakukan di indonesia membatalkan keinginan negara dalam hal mensejahterahkan rakyat, sepantasnya melalui mekanisme NCBAF dalam peraturan UNCAC Tahun 2003 dapat dijadikan sebuah trobosan hukum dalam memenuhi harapan harapan pendiri bangsa dan ideologi negara

Kata Kunci : NCBAF, Pejabat Publik, Revolusi Hukum

ABSTRACT

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) is a mechanism for asset confiscation that allows for a swift and efficient process without requiring a court ruling beforehand, commonly known as asset forfeiture without criminal conviction. Given the frequent abuse of authority or policies by public officials—leading to many being implicated in corruption, money laundering, embezzlement, and fencing—academics and law enforcement officials have taken the initiative to implement the NCBAF mechanism in Indonesia. This research aims to serve as a fundamental guideline for the adoption of the NCBAF mechanism in Indonesia, promoting a legal revolution for the people, the nation, and the country. The research employs a normative juridical method using a conceptual approach and a statute approach to address the various challenges that may arise. The findings of this study indicate that the NCBAF concept enables efficient and rapid asset confiscation while aligning with the 1945 Constitution, which upholds the rights of Indonesian citizens. It emphasizes that the confiscated assets should be allocated to meet the needs of the people, addressing the long-standing inadequacies in national infrastructure. The existing legal framework in Indonesia currently hinders the state's ability to ensure public welfare. Thus, adopting the NCBAF mechanism, as outlined in the 2003 UNCAC regulations, can serve as a legal breakthrough in fulfilling the aspirations of the nation's founders and the country's ideology.

Keywords : *NCBAF, Public Officials, Legal Revolution*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Pada ewenangan Pejabat Publik Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC 2003 Sebagai Upaya Revolusi Hukum di Indonesia”. Dalam penyusunan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan do’a dan dukungan selama penulisan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Dr. Yogi Prasetyo SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan penulis bimbingan, semangat, motivasi, saran, dan pengetahuan baru pada penulis.
4. Bapak Dr. Ucuk Agiyanto S,H.,M,Hum.selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan penulis bimbingan, semangat, motivasi, saran, dan pengetahuan baru pada penulis.
5. Bapak Alfalachu Indiantoro SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan *Staff* Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2021 yang kebersamaan berjuang selama ini
8. Alumni Ilmu Hukum yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya dalam pengerjaan Skripsi

9. Terimakasih yang mendalam untuk kekasih, Sinta Oktaferiska yang telah memberikan kontribusi besar dalam menyelesaikan skripsi dengan sebaik baiknya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kemajuan penulisan Skripsi yang lebih baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Besar harapan dari penulis agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membaca. Selain itu juga dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Apabila terdapat kesalahan yang penulis buat, penulis memohon maaf dengan setulus hati

Ponorogo, 30 Januari 2025



Penulis

MOTTO

“Keberhasilan ditentukan dari caramu memandang dunia. Menjadi yang terbaik di bidangnya adalah tentang dedikasi, ketekunan, & konsistensi. Dan saat ini perang telah usai, aku bisa pulang. Kuletakan pedang serta kubaringkan badan dengan luka yang bertulis I’M A CHAMPION!”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kupersambah karya ini untuk :

***Kedua Orang Tua**

***Saudara-saudari & Sahabat**

***Kampus Tercinta dan Pemimpin Bangsa-Bangsa**

***Negriku Tercinta, Negara Republik Indonesia**

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 30 Januari 2025



(Sendiartono Yugo Raharjo)

NIM. 21710285

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan.....	6
1.3.2 Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pengertian Pejabat Publik	14
2.1.2 Pengertian NCBAF	15
2.1.3 Pengertian <i>Society Effect</i>	18
2.1.4 Pengertian Revolusi Hukum.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Metode Pengambilan Data	31
3.5 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1 Kewenangan Pejabat Publik Yang Berpotensi Dilakukan NCBAF Dalam Hal Memulihkan Keuangan Negara Secara Masif	33

4.2	Perbedaan Dan Kelemahan Yang Mendasari Perlu Diterapkan NCBAF Dibanding KUH Pidana Dan KUH Perdata Dalam Kasus TPPU	47
4.2.1	Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dalam Mekanisme Perampasan Aset	48
4.2.2	Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dalam Mekanisme Perampasan Aset	51
4.3	Dampak dari berlakunya NCBAF bagi masyarakat menurut Undang Undang Dasar 1945 mengenai Hak Hak Warga Negara	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu.	22
Tabel 4. 1 Kelebihan NCBAF, Kelemahan Hukum Pidana dan Perdata Dalam Perampasan Aset.	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 3. 1 Diagram Alur Kewenangan Pejabat Publik Yang Berpotensi Dilakukan NCBAF.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara	78
Lampiran 2. Surat Keterangan Plagiasi.....	80